

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum di dunia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi misalnya komputer, *handphone*, *facebook*, *email*, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan yang disebut secara populer sebagai *Cybercrime* (kejahatan di dunia maya) sehingga diperlukan (*Cyber Law*) hukum dunia maya.

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dua Istilah lain yang digunakan adalah Hukum

Dunia Maya (*Virtual World Law*), Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), dan hukum Mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya.¹

Dunia maya menjadi sarana untuk tempat terjadinya suatu kejahatankejahatan yang disebut juga sebagai kejahatan siber atau Cybercrime, bagi beberapa orang kejahatan siber ini hanya dalam ruang lingkup kejahatan penipuan, hacker, penyebaran berita palsu maupun penyebaran suatu hal yang mengandung unsur pornografi, tetapi bukan hal tersebut saja yang dapat dikatakan sebagai *Cybercrime* banyak sekali bentuk kejahatan lain yang masih asing yang juga termasuk di dalam kategori Cyber Crime.² Tetapi bukan hal tersebut saja yang dapat dikatakan sebagai *Cybercrime* banyak sekali bentuk kejahatan lain yang masih asing yang juga termasuk di dalam kategori *Cyber Crime*, salah satu dari kejahatan tersebut adalah penyebaran berita palsu atau *Hoax*. Penyebaran berita palsu atau *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton

¹Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 1

² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 36

tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.³

Contoh kasus penyebaran berita bohong atau *Hoax* yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi korban dari berita bohong (*Hoax*). Dalam sebuah blog bernama *Tribunnews.wordpress*, terdapat berita yang menyatakan bahwa MUI akan menerbitkan fatwa haram tentang angpao imlek. Dalam berita *online* tersebut berjudul “*MUI Akan Bahas Fatwa Haram Mengenai Angpao Imlek, Masyarakat Berang*”, lengkap dengan pernyataan dari ketu MUI, Ma'ruf Amin. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengklarifikasi bahwa kabar tersebut bohong belaka. Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, menyebut Ma'ruf Amin tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. “Berita tersebut adalah tidak benar, bohong dan mengandung unsur fitnah, kebencian serta adu domba antar umat beragama,” ujar Zainut Tauhid Sa'adi dalam siaran persnya, Rabu (25/1/2017).

Berita tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan, kesalah pahaman dan dapat memicu konflik antar-elemen masyarakat yang dapat mengganggu harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia.

“MUI meminta kepada aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas berita bohong tersebut, dan menuntut secara hukum pelakunya, tanpa menunggu adanya pengaduan karena hal ini adalah delik pidana umum,” kata Zainut.

“Meminta kepada Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk secepatnya menutup situs yang mengunduh berita tersebut agar beritanya tidak menyebar,” ujarnya.

³ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 14 Februari 2017

Wakil Ketua MUI menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh dan tidak ikut menyebarkan berita bohong, demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di tengah kehidupan masyarakat. Sementara dari pihak Tribunnews.com, portal berita yang namanya dicatut sebagai nama blog untuk menyebar *Hoax*, mengklarifikasi bahwa blog *Tribunnewss.wordpress* bukan bagian dari Grup Tribunnews.com di bawah bendera KKG. Sehingga isi berita tersebut bukan tanggungjawab redaksi Tribunnews.com.⁴

Penyebaran berita bohong (*Hoax*) menimbulkan dampak yang besar terhadap reaksi masyarakat. Dampak dari munculnya berita bohong (*Hoax*) dalam media elektronik dapat menimbulkan keresahan yang di terima oleh masyarakat dan juga bias menimbulkan potensi konflik antara masyarakat dengan masyarakat sendiri atau masyarakat dengan pemerintah, selain itu dari penyebaran berita bohong (*Hoax*) itu sendiri situasi politik juga semakin memanas.

Penyebaran berita bohong (*Hoax*) diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Dalam Pasal 28 ayat 1 ini menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 2 yang menjelaskan bahwa : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau

⁴ Jurnal Indonesia. <http://jurnalindonesia.id/mui-pun-jadi-korban-hoax/>. Diakses 10 Februari 2017

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁵

Berangkat dari masalah maraknya penyebaran berita bohong (*Hoax*) di media sosial yang dapat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat penulis akan melakukan penelitian bagaimanakah langkah-langkah pihak kepolisian terhadap terjadinya fakta-fakta banyaknya penyebar berita bohong (*Hoax*) di media sosial yang dapat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Studi di Polresta Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan kepolisian terhadap terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam memproses secara hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial ?

⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tindakan kepolisian terhadap terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Mengetahui upaya kepolisian dalam memproses secara hukum dan mencegah penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media social.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum pidana, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dalam menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan Penelitian

Bagi perguruan tinggi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran, memperkaya teori-teori serta asas-asas hukum pidana yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar maupun penelitian hukum.

Bagi penegak hukum hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penegak hukum yang berkaitan dengan motif dan modus yang digunakan para pelaku penyebar berita bohong atau *Hoax* yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat di media cetak maupun media *Online* sehingga dapat membantu dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di persidangan.

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih cermat lagi dalam menerima berita dan mengetahui keteia

berita yang termasuk dalam berita bohong (*Hoax*). Sehingga meningkatkan kecermatan masyarakat dalam menerima berita melalui media sosial.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pola identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah dengan mengefektifkan kinerja lembaga Kepolisian.⁶

Jadi secara yuridis larangan penyebaran berita bohong dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian secara sosiologis proses penyebaran berita bohong yang banyak beredar dimasyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah di wilayah hukum Polres Malang Kota. Adapun alasan mengapa melakukan penelitian untuk mengetahui tindakan kepolisian dalam menyikapi beredarnya penyebaran berita bohong yang dapat meresahkan masyarakat terutama di wilayah hukum Kota Malang.

3. Sumber Data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Polres Malang Kota di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Kota Malang, penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau interview.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, tesis dan peraturan perundang-undangan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

. Dalam hal ini Penulis mengamati bagaimana penegakan hukum dengan melihat struktur kelembagaan untuk menghadapi kasus maraknya penyebaran berita bohong.

b. Wawancara atau *interview* yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung kepada penegak hukum Polres Malang Kota.

c. Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh Polres Malang Kota, yang berkenaan dengan proses penelitian dan penelusuran perundang-undangan serta struktur kelembagaan penegakan hukum.

d. Studi Pustaka yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literatur-literatur dan majalah-majalah.

- e. Penelusuran internet atau studi *website* yaitu dalam penelitian ini Penulis menelusuri bahan-bahan, literatur yang menunjang dari internet.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemapara atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Serta menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini penulis bagi kedalam 4 (empat) bab guna mempermudah pembaca untuk memahaminya, yaitu :

⁷ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Hlm 180

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dari obyek penelitian yang kemudian akan dilakukan analisa.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pada hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan masalah tersebut yang diangkat.